



Demokrasi Industri dan Pendidikan Vokasi dalam Membangun Budaya Partisipatif dan Keadilan Sosial di Dunia Kerja

Ridha Kartini¹, Tika Sylviani Gusti², Agus Fadly Taqwan Lubis^{3*}, Rijal Abdullah⁴,
Hendra Hidayat⁵

Program Studi Pascasarjana Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Universitas Negeri Padang, Jalan Prof. Dr. Hamka, Kampus Air Tawar, Padang, Indonesia 25131.

Email Korespondensi: aftlubis91@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pengintegrasian konsep Demokrasi Industri (DI) ke dalam pendidikan vokasi Indonesia untuk mengatasi keterbatasan pendekatan link and match yang terlalu instrumental. Meskipun model link and match berhasil mencetak lulusan yang kompeten secara teknis, ia gagal membekali mereka dengan kompetensi sosio-politik (seperti kesadaran hak pekerja, negosiasi, dan pemahaman hubungan industrial), membuat lulusan rentan dan minim partisipasi dalam pengambilan keputusan di tempat kerja. Konsep DI, yang menekankan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan pembagian kekuasaan, terbukti efektif memperkuat rasa memiliki dan meningkatkan kualitas keputusan dalam organisasi. Oleh karena itu, fokus kajian diarahkan pada bagaimana mengintegrasikan kompetensi sosio-politik termasuk kemampuan berunding dan kesadaran partisipatif ke dalam pembelajaran vokasi tanpa mengabaikan keterampilan teknis. Solusi strategis diwujudkan melalui tiga pilar utama: integrasi kurikulum, kolaborasi industri, dan dukungan kebijakan. Penelitian ini berargumen bahwa pendidikan vokasi yang berorientasi DI tidak hanya meningkatkan relevansi lulusan terhadap tantangan industri modern dan digitalisasi, tetapi juga berkontribusi langsung pada kesejahteraan sosial pekerja.

Kata kunci: Demokrasi Industri; Partisipasi Pekerja; Kompetensi Sosio-Politik.

Industrial Democracy and Vocational Education in Building a Participatory Culture and Social Justice in the World of Work

Abstract

This research examines the integration of the concept of Industrial Democracy (ID) into Indonesian vocational education to address the limitations of the overly instrumental link and match approach. While the link and match model successfully produces technically competent graduates, it fails to equip them with socio-political competencies (such as awareness of workers' rights, negotiation skills, and understanding of industrial relations), rendering graduates vulnerable and limiting their participation in workplace decision-making. The ID concept, which emphasizes the principles of equality, accountability, and power-sharing, has proven effective in fostering ownership and improving the quality of organizational decisions. Therefore, the study focuses on how to integrate socio-political competencies including negotiation abilities and participatory awareness into vocational learning without neglecting technical skills. The strategic solution is realized through three main pillars: curriculum integration, industry collaboration, and policy support. This research argues that ID-oriented vocational education not only enhances the relevance of graduates to the challenges of modern industry and digitalization but also directly impact the social welfare of workers.

Keywords: Industrial Democracy; Worker Participation; Socio-Political Competence.

How to Cite: Kartini, R., Gusti, T. S., Lubis, A. F. T., Abdullah, R., & Hidayat, H. (2025). Demokrasi Industri dan Pendidikan Vokasi dalam Membangun Budaya Partisipatif dan Keadilan Sosial di Dunia Kerja. *Empiricism Journal*, 6(4), 2474-2481. <https://doi.org/10.36312/1rvpst35>



<https://doi.org/10.36312/1rvpst35>

Copyright© 2025, Kartini et al.

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.



PENDAHULUAN

Perkembangan dunia kerja kontemporer ditandai oleh digitalisasi, otomatisasi, dan globalisasi yang mengubah struktur pekerjaan secara signifikan. Digitalisasi menghadirkan efisiensi melalui otomatisasi tugas rutin, model kerja fleksibel, hingga kolaborasi jarak jauh yang memperluas kesempatan bekerja lintas lokasi. Namun, proses yang sama juga menciptakan kerentanan baru, termasuk ketidakpastian kerja, pergeseran kebutuhan keterampilan, dan meningkatnya kesenjangan antara pekerja terampil dan tidak terampil, serta kesenjangan dalam kesempatan untuk berpartisipasi mengambil keputusan industri.

Otomatisasi membuat banyak pekerjaan berisiko tergantikan mesin, terutama pada sektor manufaktur yang selama ini menjadi ruang lingkup utama lulusan pendidikan vokasi. Data ILO menunjukkan bahwa lebih dari 60% pekerjaan di sektor elektronik, otomotif, tekstil, dan pakaian yang merupakan basis utama penyerapan lulusan vokasi berada dalam ancaman otomatisasi. Pada saat yang sama, pekerjaan baru tumbuh pesat di bidang analisis data, pembelajaran mesin, dan transformasi digital. Proyeksi World Economic Forum memperkuat tren ini dengan estimasi 97 juta pekerjaan baru di sektor digital, sementara 85 juta pekerjaan tradisional mengalami penurunan permintaan. Ketimpangan ini semakin diperlebar oleh rendahnya literasi digital, di mana hanya 28% tenaga kerja Indonesia yang memiliki keterampilan digital tingkat lanjut.

Perubahan struktural tersebut menuntut tenaga kerja yang tidak hanya menguasai kompetensi teknis, tetapi juga memiliki kemampuan adaptif, partisipatif, serta kecakapan sosial-politik untuk menavigasi dinamika hubungan industrial modern. Namun, dalam praktiknya, sistem hubungan industrial di banyak negara, termasuk Indonesia, masih didominasi oleh pola top-down yang membatasi keterlibatan pekerja dalam proses pengambilan keputusan strategis. Pekerja terutama lulusan baru dan tenaga kerja vokasi cenderung diposisikan sebagai objek produksi, bukan sebagai subjek yang memiliki suara dalam penentuan kondisi kerja, perlindungan sosial, dan arah pengembangan organisasi. Kondisi ini memperbesar risiko ketidakadilan sosial serta melemahkan daya tawar pekerja dalam menghadapi disrupti teknologi dan fleksibilisasi pasar kerja.

Konsep Demokrasi Industri menjadi relevan sebagai pendekatan yang menekankan keterlibatan pekerja dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kondisi kerja dan arah strategis organisasi. Dalam kajian kontemporer, Demokrasi Industri tidak dipahami sekadar sebagai partisipasi simbolik, melainkan sebagai mekanisme substantif yang memungkinkan terjadinya pembagian tanggung jawab, otoritas, dan pengaruh antara pekerja dan manajemen dalam struktur organisasi dan proses kerja sehari-hari (Müller-Jentsch, 2019; Frega, 2021). Dalam konteks pendidikan, khususnya pendidikan vokasi, penerapan prinsip Demokrasi Industri berpotensi menciptakan kesempatan yang setara bagi lulusan vokasi untuk tidak hanya menjadi pekerja yang kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki suara dan kapasitas partisipatif dalam pengambilan keputusan di lingkungan kerja. Namun demikian, meskipun gagasan Demokrasi Industri telah berkembang pesat dalam studi hubungan industrial dan workplace democracy, penerapannya dalam pendidikan vokasi masih relatif terbatas dan belum terintegrasi secara sistematis dalam kurikulum maupun praktik pembelajaran (Rosvall, 2024).

Sementara itu, pendidikan vokasi sebagai penyedia utama tenaga kerja industri selama ini masih sangat berfokus pada pendekatan instrumental melalui model *link and match* yang menitikberatkan pemenuhan kebutuhan teknis pasar kerja. Pendekatan ini berhasil menghasilkan lulusan yang kompeten secara praktis, namun pada saat yang sama memunculkan persoalan mendasar, yaitu minimnya pembekalan terkait pemahaman hak-hak pekerja, etika kerja, mekanisme hubungan industrial, kemampuan bernegosiasi, serta kesadaran partisipatif. Padahal, pendidikan vokasi memiliki peran strategis tidak hanya dalam pembentukan keterampilan kerja, tetapi juga dalam penguatan kompetensi demokratis dan kemampuan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan di tempat kerja (Council of Europe, 2025). Ketimpangan antara kompetensi teknis dan kompetensi sosio-politik ini menjadi persoalan krusial yang berpotensi membuat lulusan vokasi rentan terhadap eksplorasi kerja, ketidakpastian status kerja, serta marginalisasi dalam relasi industrial modern.

Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan utama penelitian ini terletak pada belum terintegrasinya prinsip-prinsip Demokrasi Industri ke dalam sistem pendidikan vokasi, baik pada level kurikulum, strategi pembelajaran, maupun capaian kompetensi lulusan. Pendidikan vokasi masih cenderung memproduksi tenaga kerja yang *technically skilled* tetapi kurang memiliki kapasitas partisipatif dan kesadaran kritis dalam menghadapi dinamika hubungan industrial di era digital. Kesenjangan inilah yang menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk merekonstruksi orientasi pendidikan vokasi agar tidak hanya responsif terhadap kebutuhan industri, tetapi juga berpihak pada penguatan posisi dan perlindungan pekerja.

Sejalan dengan permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan merumuskan bagaimana prinsip-prinsip Demokrasi Industri dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum dan praktik pendidikan vokasi tanpa mengabaikan penguatan kompetensi teknis. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk integrasi kompetensi sosio-politik—seperti kesadaran partisipatif, kemampuan berunding, dan pemahaman hubungan industrial—dalam pembelajaran vokasi, serta menganalisis kontribusinya dalam membentuk lulusan yang adaptif, berdaya tawar, dan mampu berpartisipasi aktif dalam proses-proses yang menentukan nasib mereka di dunia kerja. Dengan demikian, pendidikan vokasi diposisikan sebagai arena strategis pembentukan pekerja yang tidak hanya *technically competent* tetapi juga *socially empowered* dalam menghadapi tantangan dunia kerja digital yang kompetitif dan berkeadilan sosial.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis secara mendalam konsep, praktik, serta dinamika demokrasi industri dan pendidikan vokasi dalam konteks penerapan budaya partisipatif dan keadilan sosial di dunia kerja. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial secara holistik, kontekstual, dan interpretatif, serta menempatkan makna, nilai, dan relasi sosial sebagai fokus utama analisis. Hal ini sejalan dengan pandangan Creswell (2007) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi dan menafsirkan realitas sosial berdasarkan perspektif teoretis dan bukti empiris yang berkembang.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan fokus kajian. Sumber data meliputi buku akademik yang membahas demokrasi industri, hubungan industrial, dan pendidikan vokasi; artikel jurnal internasional terindeks Scopus dan Web of Science yang mengkaji partisipasi pekerja, kepemimpinan demokratis, keadilan sosial, serta pembelajaran vokasi berbasis tempat kerja; laporan kebijakan pendidikan dan ketenagakerjaan; serta dokumen resmi dari lembaga nasional dan internasional yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan hasil-hasil penelitian terdahulu dan studi kasus mengenai praktik kolaborasi antara industri dan lembaga pendidikan vokasi di berbagai negara sebagai bahan analisis tambahan. Pemilihan sumber data dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, dan kebaruan publikasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan analisis dokumen. Studi literatur digunakan untuk menelusuri dan menelaah secara sistematis teori, konsep, dan temuan penelitian yang berkaitan dengan demokrasi industri dan pendidikan vokasi. Analisis dokumen dilakukan untuk mengkaji isi, narasi kebijakan, serta kerangka konseptual yang termuat dalam dokumen resmi dan publikasi ilmiah. Selain itu, penelitian ini menggunakan analisis berbasis kasus yang diambil dari laporan penelitian terdahulu guna memperkaya pemahaman empiris dan memperkuat argumentasi konseptual terkait hubungan antara industri dan pendidikan vokasi.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan analisis tematik. Proses analisis diawali dengan pengumpulan dan seleksi data yang relevan dengan tujuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan pengodean data berdasarkan tema-tema utama, seperti partisipasi pekerja, kepemimpinan demokratis, keadilan sosial, dan kolaborasi industri-pendidikan. Tahap berikutnya adalah pengelompokan tema dan subtema untuk mengidentifikasi pola serta hubungan antar konsep, yang selanjutnya diinterpretasikan secara mendalam guna menarik kesimpulan analitis. Proses analisis dilakukan secara iteratif dan reflektif dengan membandingkan data, teori, dan tujuan penelitian untuk menjaga konsistensi dan kedalaman analisis.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dinilai relevan untuk menelaah dinamika hubungan antara industri dan pendidikan vokasi karena isu demokrasi industri, partisipasi, dan keadilan sosial bersifat relasional, kontekstual, dan struktural. Berbagai penelitian internasional, seperti Raelin (2013) mengenai kepemimpinan demokratis dalam industri dan Billett (2014) tentang pembelajaran vokasi dan partisipasi di tempat kerja, menunjukkan bahwa pendekatan kualitatif efektif dalam mengungkap nilai, praktik, serta struktur sosial yang memengaruhi dunia kerja dan sistem pendidikan vokasi. Dengan demikian, metode kualitatif memungkinkan peneliti mengungkap secara komprehensif keterkaitan antara nilai-

nilai demokrasi industri, partisipasi, dan keadilan sosial dalam pengembangan pendidikan vokasi yang berorientasi pada pembentukan sumber daya manusia yang demokratis dan berkeadilan. Berikut disajikan alur proses penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini.



Gambar 1. Alur Proses Penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kolaborasi antara sekolah vokasi dan industri merupakan elemen kunci dalam memastikan bahwa lulusan memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang. Kolaborasi ini bukan hanya sekadar hubungan simbolik, tetapi harus diwujudkan melalui berbagai bentuk kerjasama yang mendalam, seperti perancangan kurikulum bersama (co-design), pengajaran bersama antara guru dan praktisi industri (co-teaching), pelaksanaan praktik kerja industri yang terstruktur, serta mekanisme penilaian kompetensi yang divalidasi secara kolaboratif. Stephen Billett (2014) menekankan bahwa keterlibatan aktif industri dalam proses pembelajaran memberikan kontribusi besar terhadap penguatan workplace learning, yang tidak hanya mencakup aspek pengetahuan teknis, tetapi juga nilai, norma, dan budaya kerja yang berlaku di industri.

Praktik kolaborasi ini telah diterapkan dengan sukses di negara-negara dengan sistem pendidikan vokasi yang maju, seperti Jerman dan Swiss. Di negara-negara tersebut, industri terlibat langsung dalam penentuan standar kompetensi, penyusunan kurikulum berbasis okupasi, serta pelaksanaan pembelajaran di tempat kerja melalui sistem ganda (dual system). Sistem ini memungkinkan siswa mendapatkan pengalaman langsung dalam lingkungan kerja yang sesungguhnya, sekaligus memperkecil kesenjangan antara kompetensi yang diajarkan di lembaga pendidikan dan kebutuhan nyata industri. Temuan serupa juga disampaikan oleh Raelin (2013), yang menunjukkan bahwa kolaborasi berbasis partisipasi dan kepemimpinan demokratis di tempat kerja mampu mengurangi gap antara kompetensi yang diperoleh di lembaga pendidikan dan yang dibutuhkan di dunia kerja.



Gambar 2. Gambaran Kolaborasi Sekolah Vokasi-Industri

Kolaborasi yang kuat antara sekolah vokasi dan industri terbukti memiliki dampak signifikan dalam mengurangi skill mismatch, yaitu ketidaksesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh lulusan dan kebutuhan industri. Salah satu alasan utama skill mismatch adalah lemahnya hubungan institusional antara sistem pendidikan dan dunia usaha, yang menyebabkan sekolah tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai perkembangan teknologi, standar kerja, dan kebutuhan keterampilan yang sedang berkembang. OECD (2019) menyatakan bahwa masalah ini merupakan persoalan struktural yang perlu segera diatasi. Penelitian McGrath dan Russon (2023) mengidentifikasi beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya skill mismatch, antara lain kurikulum yang kurang adaptif terhadap perkembangan industri, keterbatasan pengalaman industri pada guru, fasilitas praktik yang tidak mutakhir, serta lemahnya sistem sertifikasi berbasis standar industri.

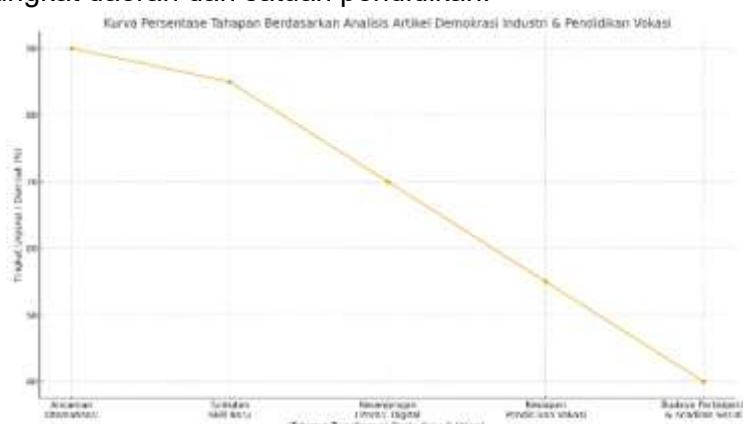
Dalam mengatasi masalah ini, penerapan prinsip Demokrasi Industri dapat menjadi solusi strategis. Demokrasi Industri membuka ruang partisipasi bagi pekerja, serikat profesi, dan pelaku industri dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi kurikulum vokasi. Dengan melibatkan aktor industri secara aktif dan setara, kurikulum pendidikan vokasi menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan riil dunia kerja dan perubahan teknologi. Prinsip ini memungkinkan terciptanya kurikulum yang lebih relevan, adaptif, dan mampu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan industri.

Relevansi kurikulum pendidikan vokasi sangat bergantung pada kemampuan sekolah untuk terus memperbarui materi pembelajaran sesuai dengan perkembangan teknologi. Hal ini menuntut keterlibatan aktif industri dalam proses perbaruan kurikulum. Meskipun kurikulum nasional di banyak negara, termasuk Indonesia, telah dirancang agar selaras dengan kebutuhan industri, berbagai studi menunjukkan adanya kesenjangan dalam implementasi kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Penelitian yang dilakukan oleh Cedefop (2019) serta Busemeyer dan Trampusch (2011) menunjukkan bahwa keterbatasan sarana praktik, kompetensi pedagogik guru, dan pengalaman industri pada guru menjadi faktor utama yang menghambat penerapan kurikulum berbasis industri di banyak sekolah. Dalam hal ini, penerapan prinsip Demokrasi Industri dapat mengurangi kendala tersebut dengan membuka ruang untuk dialog sosial dan pengambilan keputusan bersama antara pemerintah, sekolah, dan industri, sehingga kebijakan kurikulum dapat disusun secara lebih inklusif dan memperhatikan realitas di tingkat pelaksana.

Budaya partisipatif dan keadilan sosial dalam pendidikan vokasi juga merupakan unsur penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan adil. Pendidikan vokasi yang partisipatif tidak hanya melibatkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran, tetapi juga komunitas dan mitra industri dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini mendorong kesetaraan akses bagi semua kelompok, termasuk kelompok rentan, untuk memperoleh peluang yang sama dalam pengembangan keterampilan. Pendekatan ini selaras dengan prinsip Demokrasi Industri yang menekankan pentingnya partisipasi, dialog, dan pembagian peran yang adil dalam sistem kerja. Penelitian Scully-Russ dan Torraco (2020) menunjukkan bahwa partisipasi dalam proses pembelajaran dan kerja dapat

meningkatkan motivasi, rasa memiliki, serta relevansi pembelajaran dengan kebutuhan sosial dan ekonomi lokal. Oleh karena itu, penerapan Demokrasi Industri dalam pendidikan vokasi tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten secara teknis, tetapi juga membentuk budaya kerja yang inklusif dan partisipatif sejak proses pendidikan.

Hubungan industrial dan kebijakan pendidikan vokasi memiliki peran strategis dalam memperkuat ekosistem vokasi secara berkelanjutan. Kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi kualitas dan arah kerjasama antara sekolah dan industri, baik melalui penyediaan insentif, pengaturan sertifikasi kompetensi, maupun penerapan sistem ganda. Penelitian Euler (2023) menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan vokasi sangat dipengaruhi oleh sinkronisasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan dalam aspek pendanaan, pelatihan guru, serta monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan. Kebijakan yang tidak disertai dengan kapasitas implementasi yang memadai, serta partisipasi aktif aktor terkait, dapat menyebabkan skill mismatch tetap tinggi, meskipun kerangka kebijakan telah disusun dengan baik. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan vokasi bergantung pada keseriusan pemerintah dalam memperkuat kapasitas implementasi di tingkat daerah dan satuan pendidikan.



Gambar 3. Kurva Tahapan Transformasi Dunia Kerja dan Industri

KESIMPULAN

Pendidikan vokasi berperan strategis sebagai penyedia utama tenaga kerja industri melalui pendekatan link and match yang berorientasi pada kebutuhan dunia kerja yang terus mengalami transformasi digital. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan perspektif Demokrasi Industri dalam pengembangan kurikulum dan praktik pendidikan vokasi memungkinkan terwujudnya kolaborasi sekolah dan industri yang lebih substantif, partisipatif, dan berkelanjutan. Kolaborasi tersebut, yang diwujudkan melalui perancangan kurikulum bersama, pelibatan instruktur industri, praktik kerja terstruktur, serta penilaian berbasis standar industri, terbukti meningkatkan relevansi kompetensi lulusan sekaligus menekan terjadinya skill mismatch. Dalam konteks dunia kerja digital, pendidikan vokasi berbasis Demokrasi Industri mendorong kurikulum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, kebutuhan keterampilan baru, dan perubahan pola kerja, karena proses pengambilan keputusan pembelajaran melibatkan aktor industri dan pekerja secara langsung. Selain itu, budaya partisipatif yang dikembangkan dalam pendidikan vokasi tidak hanya meningkatkan kesiapan teknis lulusan, tetapi juga membentuk sikap adaptif, kolaboratif, dan kemampuan belajar berkelanjutan yang dibutuhkan di era digital. Dari sisi keadilan sosial, pendekatan ini membuka akses yang lebih setara bagi siswa dari berbagai latar belakang melalui keterlibatan komunitas dan industri dalam mendukung proses pembelajaran, sehingga pendidikan vokasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemenuhan kebutuhan industri, tetapi juga sebagai sarana pengurangan ketimpangan sosial dan peningkatan mobilitas kerja. Dengan dukungan kebijakan pemerintah yang konsisten dan terkoordinasi, pendidikan vokasi berbasis Demokrasi Industri berpotensi menghasilkan lulusan yang tidak hanya siap kerja, tetapi juga siap berpartisipasi aktif dalam ekosistem kerja yang demokratis dan berkeadilan.

REKOMENDASI

Berdasarkan temuan dan analisis penelitian, pemerintah perlu mengambil peran yang lebih tegas dan strategis dalam memperkuat kolaborasi antara sekolah vokasi dan industri melalui kebijakan yang bersifat operasional dan berkelanjutan. Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan adanya kerangka regulasi yang mendorong keterlibatan industri secara aktif dalam perancangan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, serta penilaian kompetensi, bukan sekadar dalam bentuk kemitraan administratif. Kebijakan tersebut perlu disertai dengan mekanisme insentif yang jelas bagi industri yang berpartisipasi, seperti pengakuan kontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia, kemudahan regulasi, atau dukungan fiskal, sehingga kolaborasi sekolah-industri dapat berjalan secara konsisten dan saling menguntungkan. Selain itu, penguatan kapasitas guru vokasi harus menjadi prioritas kebijakan dalam implementasi pendidikan vokasi berbasis Demokrasi Industri. Pemerintah perlu memperluas dan memperdalam program pelatihan serta pembekalan guru vokasi melalui skema pemagangan industri, pelatihan berbasis teknologi terkini, dan sertifikasi kompetensi yang diakui industri. Guru vokasi tidak hanya dituntut memiliki kompetensi pedagogik, tetapi juga pengalaman praktis dan pemahaman aktual terhadap budaya kerja industri, sehingga mampu berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang relevan dan adaptif. Tanpa dukungan kebijakan yang sistematis dalam pengembangan kompetensi guru, upaya integrasi kurikulum partisipatif dan kolaboratif akan sulit diimplementasikan secara optimal di tingkat satuan pendidikan. Lebih lanjut, pemerintah perlu membangun sistem monitoring dan evaluasi kolaborasi sekolah dan industri yang berbasis partisipasi dan umpan balik berkelanjutan. Sistem ini harus melibatkan sekolah, industri, asosiasi profesi, dan peserta didik untuk menilai efektivitas kurikulum, relevansi kompetensi lulusan, serta dampak kebijakan terhadap pengurangan skill mismatch dan peningkatan kesiapan kerja. Dengan pendekatan tersebut, kebijakan pendidikan vokasi tidak hanya bersifat top-down, tetapi berkembang secara adaptif sesuai dengan dinamika dunia kerja dan kebutuhan sosial. Secara keseluruhan, rekomendasi kebijakan ini menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan vokasi berbasis Demokrasi Industri sangat bergantung pada konsistensi regulasi, penguatan kapasitas pelaksana, serta komitmen pemerintah dalam menciptakan ekosistem kolaboratif yang berkelanjutan dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Billett, S. (2014) *Mimetic learning at work*. Dordrecht: Springer.
- Busemeyer, M.R. and Trampusch, C. (eds.) (2011) *The political economy of collective skill formation*. Oxford: Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199599431.001.0001>
- Cedefop (2019) *European skills index 2018*. Luxembourg: Publications Office of the European Union. <https://doi.org/10.2801/564143>
- Council of Europe (2025a) *Learning democracy in vocational education and training (VET)*. Strasbourg: Council of Europe Publishing.
- Council of Europe (2025b) *Learning democracy in vocational education and training in Europe: An anthology*. Strasbourg: Council of Europe Publishing.
- Creswell, J.W. (2007) *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. 2nd edn. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Euler, D. (2023) *Roadmap to high-quality dual vocational education and training*. Bonn: Federal Institute for Vocational Education and Training (BIBB). <https://doi.org/10.11586/2023061>
- Frega, R. (2021) 'Employee involvement and workplace democracy', *Business Ethics Quarterly*, 31(4), pp. 1–25. Cambridge: Cambridge University Press.
- McGrath, S. and Russon, J.-A. (2023) 'TVET SI: Towards sustainable vocational education and training: Thinking beyond the formal', *Southern African Journal of Environmental Education*, 39, pp. 1–18. <https://doi.org/10.4314/sajee.v39i.03>
- Müller-Jentsch, W. (2019) 'Industrial democracy: Historical development and current challenges', *Transfer: European Review of Labour and Research*, 25(1), pp. 1–15.

- OECD (2019) *OECD skills strategy 2019: Skills to shape a better future*. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264313835-en>
- Raelin, J.A. (2013) 'The manager as facilitator of dialogue', *Organization*, 20(6), pp. 818–839. <https://doi.org/10.1177/1350508412455085>